

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA JASA TABUNGAN  
BANK SYARIAH DI BNI SYARIAH CABANG UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

**YOSEP BASKORO WIDIASTO**

**NPM : 100510246**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2016**

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA JASA TABUNGAN BANK SYARIAH DI  
BNI SYARIAH CABANG UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**YOSEP BASKORO WIDIASTO**

**NPM : 100510246**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing**

**Pada tanggal 29 Februari 2016**

**Dosen Pembimbing**

**Dr.Th.Anita Christiani, S.H., M.Hum**

**Mengetahui**

**Dekan**



**FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M**

## ABSTRACT

*Sharing System Implementation Services Syariah Savings Bank BNI Syariah Branch in the Islamic University of Indonesia YOGYAKARTA.*

*This paper aims to find out more about the implementation of Sharia principles in Shariah bank savings services in BNI Syariah Branch of the Islamic University of Indonesia. This paper uses normative legal research, focusing on the positive legal norms which legislation neighbor to the system results in savings services.*

*During the progress, the banking sector is not only operating conventionally but also in sharia way. Islamic banking with Islamic system is a breakthrough in the world of banking and comes as an alternative for those who doubt the conventional system. There are so many factors why some people choose conventional banks and banks operating in accordance with Islamic law. Customers selecting the sharia system are Muslims who do not want to violate Islamic law inherent in the conventional banking system. According to the hadith mentioned in the Qur'an, it is not valid if a Muslim do a business transaction in a vanity way (not valid according to sharia). As a result, Bank Indonesia provides an option to the public by providing the banking system operates conventionally and in sharia way.*

**Keywords:** *conventional system and sharia system*

## 1. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia terlebih lagi untuk bertransaksi jual beli, sewa menyewa maupun sewa beli. Masyarakat Indonesia terutama yang hidup di perkotaan atau di kota-kota besar sudah tidak asing lagi mendengar kata bank. Perbankan juga merupakan faktor ekonomi sosial yang sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang ini sebagian besar masyarakat pedesaan pun sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi ketika puluhan bank yang ditutup karena krisis beberapa waktu lalu melanda Indonesia.

Masyarakat mengenal bank masih sebatas artian sempit, mereka hanya mengetahui bahwa fungsi bank hanya sebagai tabungan dan kredit saja, selebihnya tidak tahu, padahal banyak layanan bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini. Wajar ketika sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengenal bank secara terperinci, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah banyak berhubungan dengan produk bank. Dalam perkembangan jaman, bank konvensional menerapkan sistem konvensional atau sering disebut dengan konvensi yang berarti

kesepakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (5) bahwa “Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengambilan keuntungan, bank mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor. Masyarakat umum menganggap bank hanya tempat menyimpan uang saja, padahal bank banyak fungsinya, misalnya seperti peminjaman modal untuk usaha kecil dan menengah untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Munculnya sistem perbankan syariah sebagai solusi bagi kesejahteraan dan keadilan umat manusia belakangan ini memberikan harapan bagi kehidupan perbankan yang lebih baik. Perkembangan perbankan syariah secara faktual implementasinya masih jauh dari konsep filosofinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (13) bahwa “prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijrah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijrah wa iqtina).”

## 2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana sistem bagi hasil dalam implementasi sistem bagi hasil pada jasa tabungan bank Syariah di BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia Yogyakarta?

## 3. METODE

Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang sistem bagi hasil dalam jasa tabungan.

### 1. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga memerlukan data sekunder ( bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
  - 1) Undang-undang Dasar 1945
  - 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam tabungan di bank syariah.

### 2. Narasumber

- a. Manager Bank BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia
- b. Teller Bank BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia

### 3. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer

Deskripsi peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) terhadap UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang mengatur tentang perekonomian, Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan , Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankn Syariah.

Langkah selanjutnya dilakukan analisis bahan sekunder dengan mencari persamaan dan perbedaan maupun pendapat dari narasumber guna memperoleh sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, tabloid, dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, tentang bunga bank dan bagi hasil dalam jasa tabungan.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum, bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari analisis data maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penalaran menggunakan deduktif yaitu penalaran hukum dari umum ke khusus. Dalam hal ini proporsi umum yaitu tentang perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (3) “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Bank yang beroperasi secara konvensional tertera dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (4) bahwa “Bank Konvensional adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank perkreditan rakyat. Bank merupakan badan usaha yang bergerak secara konvensional dan secara sistem

syariah sebagai bentuk simpanan dan pemberian kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Setiap pihak yang mendirikan kegiatan usaha di bidang perbankan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari pemimpin Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam rangka persetujuan ataupun penolakan atas permohonan izin usaha perbankan selain memerhatikan pemenuhan persyaratan oleh si pemohon, juga memerhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam satu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, setiap pemohon izin usaha perbankan wajib

memenuhi persyaratan yang menyangkut :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang perbankan; dan
- e. Kelayakan rencana kerja.

Di samping memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, juga perlu memperhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bank, yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.

#### **a. Pengertian Prinsip Suku Bunga**

Bank konvensional beroperasi secara konvensional berdasarkan paham yang disampaikan oleh Adam Smith. Menurut teori klasik, teori tingkat

suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada *investable fund* yang bersumber dari tabungan. Fungsinya yang menonjol dari uang dalam teori ekonomi klasik, adalah sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi, sebagai alat pertukaran untuk memperlancar transaksi barang dan jasa, maupun sebagai alat penyelesaian hubungan hutang-piutang yang menyangkut masa depan.

Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori *liquidity preference*. Berdasarkan teori Keynes mengenai suku bunga bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter



yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang.

Dalam Konsep Keynes, alternatif penyimpanan kekayaan terdiri dari surat berharga (bonds) dan uang tunai. Asumsi Teori Keynes adalah dasar pemilikan bentuk penyimpanan kekayaan adalah perilaku masyarakat yang selalu menghindari resiko dan ingin memaksimumkan keuntungan.

Dapat dianalisis bahwa Keynes tidak sepakat akan pendapat dengan teori klasik, menurut Keynes pendapatan bunga seseorang ditentukan oleh pendapatan orang itu sendiri tergantung pendapatan orang tersebut. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, semakin

besar pula jumlah tabungan yang akan diperolehnya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti keatas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga dan bukannya tingkat bunga.

Maka bunga dapat diartikan dan dapat dibagi fungsinya sebagai berikut :

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

- a. Bunga simpanan  
Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.<sup>1</sup>

Dapat dikaji bahwa bank konvensional menggunakan sistem tingkat suku bunga, yaitu suatu sistem dimana suku bunga sudah ditentukan sepihak oleh bank untuk para nasabah. Suku bunga yang ditentukan oleh bank tidak dapat dirubah oleh pihak nasabah, jadi pihak nasabah harus

tunduk dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak bank (kontrak standar bank). Apabila nasabah tidak sepakat dengan sistem ini maka nasabah boleh mengundurkan diri sebagai nasabah bank tersebut.

## 1. Pengertian dan Pengaturan Bank

### Syariah

Perbankan merupakan urat nadi lembaga keuangan merupakan industri yang sangat vital bagi perekonomian masyarakat. Ada beberapa pengertian yang terkait perbankan syariah, antara lain Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan Bank Islam sebagai "*Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalaam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang*

<sup>1</sup> Dr.Kasmir,2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada,Jakarta hal 154

*menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.”*

Sementara itu Warkum Sumitro mendefinisikan Bank Islam sebagai berikut : *“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.”* Cholil Uman mendefinisikan Bank Islam sebagai sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 7 bahwa “ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah

dan bank pembiayaan rakyat syariah.”

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perrubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (13) mengatakan bahwa “ Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan cara memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijrah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijrah wa iqtina*).

Pengertian fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keputusan,pendapat yang diberikan oleh mutfi tentang suatu masalah. Nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Bambang Hermanto,2014 Hukum Perbankan Syariah, Penerbit KAU KABA DIPAANTARA, Yogyakarta hal 30.

<sup>3</sup><http://kbbi.web.id/fatwa> diakses tanggal 25 November 2015

Fatwa merupakan pendapat para ahli berdasarkan al-quran dan hadist.

Agama Islam mempunyai prinsip hukum Islam yang meliputi :

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah :

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama *ridha*.
- e. Tidak ada unsur riba, masyir (perjudian/sepkulasi), dan gharar (ketidakjelasan/ samar-samar).<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwa prinsip Islam dalam muamalah mempunyai arti jika diterjemahkan artinya sebagai berikut :

- a. Tidak mencari keuntungan barang / keuntungan haram, serta tidak mencari keuntungan pada hal yang dilarang oleh agama. Zat yang berarti

barang. Cara mencari keuntungan tidak boleh menipu orang lain. Dan mencari keuntungan tidak untuk hal yang dilarang agama.

- b. Tidak melakukan sesuatu pada tempatnya. Misalnya janji harus ditepati, ketika janji tidak ditepati namanya zalim.

Didalam agama islam semua harus sesuai dengan aturannya.

- c. Harus sama rata dan tidak saling membeda-bedakan, kemudian digunakan bersama-sama untuk tidak menyelewengkan.

conoh : yang kaya berkewajiban memberi, yang miskin berhak menerima. Itu adalah adil.

- d. Berdasarkan suka sama suka / sukarela. Setiap transaksi apapun harus berdasarkan sukarela.

<sup>4</sup><http://www.reksadanasyariah.net/2008/08/investasi-dalam-perspektif-syariah.html> diakses 25 November 2015

Contoh : A menawar barang  
seharga Rp.1000,00 = ridho

B tidak mau menjual = tidak  
ridho

Riba = menganak  
pinakkan

Maisir = untung-  
untungan, spekulasi, perjudian

Gharar = sesuatu yang tidak  
jelas / penipuan.

Misalnya mendapatkan uang  
dari hasil korupsi untuk  
membuat usaha yang halal  
(money laundry).

## 5. KESIMPULAN

- a. Tabungan iB Hasanah  
atau tabungan dalam  
Bank Syariah  
mempunyai dua jenis  
akad yaitu tabungan  
akad *wadi'ah* dan akad  
*mudharabah*.

Unsur-unsur dalam prinsip  
syariah yaitu riba, bagi hasil,  
haram, halal.

Dalam tabungan *mudharabah*  
sudah ditetapkan prinsip syariah.

iB Hasanah *wadi'ah* belum  
menerapkan sistem syariah  
sesuai Undang-undang Nomor  
21 Tahun 2008 tentang  
Perbankan Syariah.

- b. Faktor-faktor yang  
menghambat implementasi  
prinsip syariah adalah  
diantaranya :

- i. Bank membutuhkan dana  
operasional untuk menjalankan  
sirkulasi keuangan bank.
- ii. Bank sebagai penyalur dana  
kepada masyarakat atau  
sebagai lembaga pemberi  
kredit.
- iii. Bank dalam kegiatannya tidak  
hanya menyimpan dana yang  
diperoleh, akan tetapi untuk  
pemanfaatannya bank  
menyalurkan kembali dalam  
bentuk kredit kepada  
masyarakat yang memerlukan

dana segar untuk usaha.  
Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit.

## **6. REFERENSI**

Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, 2012, PT Citra Aditya Bakti : Bandung

Dwiono Abu Muhammad, *Ayo Ke Bank Syariah*, 2014, Pustaka Ishlahul Ummah : Jakarta

Hermanto Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, 2014, KAKUBA DIPANTARA : Yogyakarta